
Policy Paper: Strategies for Extreme Poverty Alleviation Based on Social Risk Management in Sumedang Regency

Gatot Handoko

¹Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang

Article Info

Article history:

Received April 12, 2025

Revised Mei 20, 2025

Accepted Jun 16, 2025

Keywords:

Extreme Poverty

Social Risk Management

Policy Analysis

Sumedang Regency

Sustainable Development

ABSTRACT

The eradication of extreme poverty is a national development priority in Indonesia, aligned with the SDGs targets and Presidential Instruction No. 4 of 2022. Sumedang Regency recorded significant success by reducing the extreme poverty rate from 3.11% in 2022 to 0.53% in 2023. However, this achievement faced sustainability challenges due to a policy approach that tended to be reactive, focusing on coping with poverty that had already occurred. This research aimed to formulate a proactive and sustainable policy framework for extreme poverty alleviation through the Social Risk Management (SRM) approach. Using policy analysis methods and a qualitative descriptive approach, this study analyzed the planning documents and program achievement reports of the Sumedang Regency Government. The analysis results showed that existing programs had already covered the three SRM pillars prevention, mitigation, and coping but were not yet integrated into a systematic risk framework. This study identified key gaps in the aspects of early risk identification and preventive interventions for vulnerable groups. The main policy recommendation was to institutionalize the SRM framework into the 2025-2029 Regional Poverty Alleviation Action Plan (RAD PK), strengthen the role of Bappeda as the risk management coordinator, and optimize pentahelix collaboration to build sustainable socio-economic resilience.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Gatot Handoko,
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang,
Sumedang.
Email: hanidanum@gmail.com

1. INTRODUCTION

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan global, yang tercantum secara eksplisit dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (United Nations, 2015). Komitmen ini diperkuat di tingkat nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menetapkan target ambisius nol persen pada tahun 2024 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasar untuk menopang kelangsungan hidup, dengan garis batas yang setara dengan paritas daya beli (PPP) internasional (Badan Pusat Statistik, 2023).

Di tingkat daerah, Kabupaten Sumedang menunjukkan dinamika yang patut dicermati. Setelah mengalami peningkatan angka kemiskinan ekstrem dari 2,69% (2021) menjadi 3,11% (2022), pemerintah daerah berhasil mencatatkan penurunan yang sangat drastis pada tahun 2023 menjadi 0,53% (BPS Kabupaten Sumedang, 2024). Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan ini didorong oleh respons strategis dalam perbaikan tata kelola data, khususnya melalui optimalisasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diintegrasikan secara kolaboratif (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023).

Meskipun capaian ini signifikan, keberlanjutannya menghadapi tantangan. Pendekatan yang selama ini diterapkan cenderung bersifat reaktif, yaitu berfokus pada respons terhadap kondisi kemiskinan yang sudah terjadi (*coping mechanism*). Pendekatan ini belum secara sistematis mengelola kerentanan dan risiko yang menyebabkan rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Tantangan struktural, seperti paradoks kemiskinan di kawasan industri Cimanggung dan risiko bencana alam, menuntut adanya pergeseran paradigma kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang lebih proaktif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumedang. Studi ini mengusulkan transisi dari pendekatan reaktif menuju adopsi kerangka Manajemen Risiko Sosial (SRM). Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi daerah, diharapkan Pemkab Sumedang tidak hanya mampu menangani kemiskinan yang ada, tetapi juga membangun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat untuk mencegah kemiskinan di masa depan.

2. LITERATURE STUDY

2.1. Manajemen Risiko Sosial (SRM) sebagai Kerangka Proaktif

Kerangka konseptual utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen Risiko Sosial (Social Risk Management - SRM). Pendekatan ini diperkenalkan oleh Bank Dunia dan dikembangkan secara teoretis oleh Holzmann dan Jorgensen (2001), sebagai sebuah pergeseran paradigma. SRM mengubah fokus kebijakan perlindungan sosial, dari yang semula bersifat pasif dan reaktif (seperti jaring pengaman sosial konvensional) menjadi sebuah kerangka kerja yang proaktif dan komprehensif.

Berbeda dengan kebijakan reaktif yang berfokus pada penanganan (*coping*) setelah guncangan (seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau sakit) terjadi, SRM bertujuan membantu individu, rumah tangga, dan komunitas untuk mengelola risiko secara lebih efektif sebelum guncangan tersebut menyebabkan kejatuhan ke dalam jurang kemiskinan (World Bank, 2013).

Holzmann dan Jorgensen (2001) berargumen bahwa kemiskinan seringkali bukanlah kondisi statis, melainkan hasil dari kegagalan dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi oleh kelompok rentan. Risiko-risiko ini dapat dikategorikan sebagai:

1. Risiko Idiosinkratik: Risiko yang spesifik menimpa individu atau rumah tangga (misalnya, sakit, kematian pencari nafkah, kehilangan pekerjaan).
2. Risiko Kovariat: Risiko yang berdampak pada seluruh komunitas atau wilayah (misalnya, bencana alam seperti longsor (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023), kegagalan panen, atau resesi ekonomi lokal).

Dengan demikian, SRM menyediakan sebuah kerangka kerja holistik untuk merancang intervensi kebijakan yang terstruktur.

2.2. Tiga Pilar Manajemen Risiko Sosial

Kerangka SRM beroperasi melalui tiga pilar strategis yang saling melengkapi (Holzmann & Jorgensen, 2001; World Bank, 2013):

1. Strategi Pencegahan (Prevention): Merupakan pilar paling proaktif yang berfokus pada intervensi untuk mengurangi probabilitas terjadinya risiko atau menekan besaran dampaknya sebelum guncangan terjadi. Dalam konteks kemiskinan ekstrem di Sumedang, strategi ini mencakup investasi pada modal manusia (seperti layanan kesehatan primer, gizi, dan pendidikan vokasi) serta peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar dan aset produktif (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023). Tujuannya adalah membangun ketahanan (*resilience*) jangka panjang.
2. Strategi Mitigasi (Mitigation): Pilar ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif ketika sebuah guncangan tidak dapat dihindari. Ini mencakup mekanisme pembagian risiko (*risk-pooling*), baik yang berbasis pasar (seperti asuransi mikro, jaminan sosial ketenagakerjaan) maupun non-pasar (seperti skema tabungan komunitas atau diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga) yang juga telah diidentifikasi dalam program daerah (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023). Tujuannya adalah menstabilkan konsumsi dan mencegah rumah tangga rentan menjual aset produktifnya saat krisis.
3. Strategi Penanganan (Coping): Ini adalah pilar yang bersifat responsif atau reaktif, memberikan dukungan setelah guncangan terjadi dan dampaknya telah dirasakan. Ini adalah ranah jaring pengaman sosial (*social safety nets*) tradisional, seperti Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program padat karya tunai yang saat ini menjadi fokus utama program di Sumedang (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023). Sebagaimana diidentifikasi dalam pendahuluan, kebijakan saat ini cenderung masih berfokus berat pada pilar ini.

2.3. Kaitan SRM dengan Kemiskinan sebagai Perampasan Kapabilitas

Adopsi kerangka SRM ini sejalan secara fundamental dengan definisi kemiskinan yang lebih luas, sebagaimana digagas oleh Amartya Sen (1999). Dalam karyanya *Development as Freedom*, Sen mendefinisikan kemiskinan bukan sekadar sebagai rendahnya pendapatan (*income poverty*), melainkan sebagai "perampasan kapabilitas" (*capability deprivation*). Kapabilitas adalah kebebasan substantif yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai, seperti bebas dari penyakit yang dapat dicegah, memiliki gizi cukup, atau mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kerangka SRM, khususnya pilar pencegahan (intervensi kesehatan dan pendidikan) dan mitigasi (perlindungan aset), secara langsung menjawab tantangan perampasan kapabilitas ini. Kebijakan yang hanya berfokus pada pilar coping (seperti BLT) mungkin dapat mengatasi kemiskinan pendapatan sementara, namun gagal membangun ketahanan jangka panjang terhadap perampasan kapabilitas (Suryahadi, et al., 2021). SRM menyediakan instrumen untuk melindungi dan memperluas ruang kapabilitas individu dan rumah tangga.

2.4. Konteks Kebijakan Nasional dan Riset Terdahulu

Di tingkat nasional, urgensi pergeseran paradigma dari reaktif ke proaktif berbasis risiko telah diakui secara formal. Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) (Pemerintah Republik Indonesia, 2023) menandakan adanya kesadaran untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh siklus pembangunan, tidak terkecuali program sosial. Penelitian ini menempatkan SRM sebagai implementasi spesifik dari mandat MRPN dalam konteks penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia telah menyoroti pentingnya perlindungan sosial yang adaptif dalam menghadapi guncangan (Adi, 2020; Suryahadi, et al., 2021). Adi (2020) menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi mitigasi risiko sosial. Sementara itu, Suryahadi, et al. (2021) menyoroti dinamika kemiskinan dan kerentanan di Indonesia, menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang berada tipis di atas garis kemiskinan dan sangat rentan jatuh kembali ke bawah akibat guncangan kecil.

Meskipun demikian, studi yang secara eksplisit memetakan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat kabupaten/kota ke dalam kerangka tiga pilar SRM dan mengusulkan institutionalisasinya dalam perencanaan daerah (RAD PK) masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengambil studi kasus empiris di Kabupaten Sumedang, yang telah menunjukkan keberhasilan awal namun membutuhkan strategi keberlanjutan.

Penelitian terkini di Indonesia juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial yang responsif terhadap krisis, sebuah konsep yang dikenal sebagai Perlindungan Sosial Adaptif (ASP). Studi oleh Haryaningsih et al. (2024), menemukan bahwa program bantuan sosial yang cepat dan tepat sasaran selama pandemi COVID-19 berhasil mencegah jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan. Temuan ini memperkuat argumen untuk melembagakan pilar mitigasi dan *coping* (penanggulangan) dalam kerangka manajemen risiko yang lebih sistematis dan adaptif, tidak hanya reaktif.

3. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam kerangka kebijakan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang. Jenis penelitian ini dirancang sebagai studi kebijakan (*policy analysis*) (Dunn, 2018) yang dilakukan melalui metode desk study atau studi kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data primer berasal dari dokumen-dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang, termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (RAD PK), dan Laporan Capaian Kinerja (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023). Data sekunder pendukung mencakup data statistik kemiskinan ekstrem dari Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Sumedang, 2024) dan data sasaran dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) kualitatif (Krippendorff, 2018) dan pemetaan kebijakan. Proses analisis berjalan dalam beberapa tahap:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan dokumen kebijakan, laporan implementasi, dan data statistik terkait kemiskinan ekstrem di Sumedang periode 2021-2023.
2. Analisis Deskriptif: Menganalisis data BPS untuk memotret gambaran empiris dan tren penurunan kemiskinan ekstrem serta mengidentifikasi tantangan lokal.

3. Pemetaan SRM: Menganalisis dan memetakan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada ke dalam tiga pilar kerangka Manajemen Risiko Sosial (SRM), yaitu pencegahan (prevention), mitigasi (mitigation), dan penanganan (coping).
4. Analisis Kesenjangan: Mengidentifikasi kesenjangan kebijakan (policy gaps) antara program yang ada dengan kerangka SRM yang ideal.
5. Perumusan Rekomendasi: Mensintesis temuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan strategis.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Temuan di Sumedang, di mana program penanggulangan kemiskinan cenderung reaktif dan belum terintegrasi secara penuh dalam kerangka risiko yang sistematis, sesungguhnya mencerminkan tantangan yang lebih luas di tingkat nasional. Penelitian akademis terkini, seperti studi oleh Gasior et al. (2023), juga menyoroti bahwa meskipun sistem perlindungan sosial di Indonesia efektif dalam situasi normal, sistem tersebut belum cukup kuat untuk mempersiapkan rumah tangga rentan dalam menghadapi guncangan (shocks) besar seperti bencana atau krisis ekonomi.

Kebutuhan akan kerangka kerja yang responsif terhadap guncangan ini sebuah konsep yang dikenal sebagai Perlindungan Sosial Adaptif (ASP) menjadi sangat krusial. Studi oleh Haryaningsih et al. (2024), misalnya, menemukan bahwa program bantuan sosial yang cepat dan tepat sasaran selama pandemi COVID-19 berhasil mencegah jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan. Temuan ini memperkuat argumen artikel ini bahwa kerangka kerja di Sumedang perlu diperkuat, terutama pada dua pilar yang teridentifikasi masih lemah: pencegahan (prevention) dan mitigasi (mitigation).

Pada pilar pencegahan, strategi proaktif dapat difokuskan pada investasi modal manusia untuk memutus siklus kemiskinan antar-generasi. Penelitian oleh Sari & Nugroho (2025) menegaskan bahwa peningkatan 'Harapan Lama Sekolah' (Expected Years of Schooling) memiliki pengaruh signifikan dalam menekan tingkat kemiskinan. Selain pendidikan formal, Nurashiah & Khasanah (2025) juga menunjukkan bahwa vocational training (pelatihan kejuruan) berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan kelompok rentan, yang secara langsung berfungsi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan keterampilan praktis.

Pada pilar mitigasi, untuk mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap guncangan pendapatan atau kesehatan, kerangka kerja di Sumedang dapat mengadopsi instrumen keuangan mikro. Studi oleh Effendi (2025) menyoroti peran krusial microbanking dan asuransi mikro (microinsurance) sebagai instrumen mitigasi risiko formal bagi kelompok berpendapatan rendah. Instrumen ini membantu mereka mengelola guncangan tanpa harus menjual aset produktif atau jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Dengan mengintegrasikan temuan-temuan terbaru ini, rekomendasi kebijakan untuk melembagakan kerangka SRM (Manajemen Risiko Sosial) ke dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Sumedang menjadi semakin kuat dan relevan secara akademis.

4.1. Gambaran Empiris dan Capaian Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Sesuai dengan arahan kebijakan nasional (Inpres No. 4 Tahun 2022), penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama di Kabupaten Sumedang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dinamika yang signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Table 1. Perkembangan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sumedang (2021-2023)

Tahun	Persentase Kemiskinan Ekstrem (%)	Jumlah Jiwa
2021	2.69%	31.141
2022	3.11%	36.108
2023	0.53%	6.155

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (2024), diolah penulis.

Tabel 1 menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 3,11%, yang indikasinya merupakan dampak berkepanjangan dari krisis ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Namun, terjadi penurunan yang sangat drastis dan signifikan pada tahun 2023, di mana angka kemiskinan ekstrem anjlok menjadi 0,53%.

Temuan dari analisis dokumen kebijakan (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023) menunjukkan bahwa capaian ini tidak terlepas dari respons strategis pemerintah daerah. Faktor kunci keberhasilan ini adalah perbaikan fundamental dalam tata kelola data sasaran. Optimalisasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (e-Simpat) dan dikolaborasi secara pentahelix, memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran (by name by address).

4.2. Analisis Tantangan Lokal dan Risiko Spesifik

Meskipun capaian penurunan tersebut sangat impresif, capaian ini didominasi oleh intervensi yang bersifat penanganan (coping). Untuk menjamin keberlanjutan, analisis harus bergeser pada identifikasi risiko dan kerentanan yang mendasarinya.

Di balik keberhasilan penurunan angka, Sumedang menghadapi tantangan struktural yang unik, yang dalam penelitian ini disebut sebagai "Paradoks Cimanggung". Kecamatan Cimanggung merupakan kawasan industri padat karya dengan laju ekonomi tinggi, namun ironisnya juga menyumbang angka kemiskinan (termasuk ekstrem) yang signifikan (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya risiko idiosinkratik yang tinggi: banyak pekerja di sektor informal atau buruh dengan upah rendah yang sangat rentan terhadap guncangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau sakit.

Selain itu, Sumedang memiliki risiko kovariat yang signifikan terkait kondisi geografis. Sebagian wilayah, khususnya di area padat penduduk, memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023). Guncangan akibat bencana ini dapat secara instan mendorong rumah tangga rentan (yang berada tipis di atas garis kemiskinan) jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.

Kedua tantangan ini kesenjangan struktural di area industri dan risiko bencana menegaskan bahwa pendekatan reaktif (coping) tidaklah cukup. Diperlukan sebuah kerangka kerja yang mampu mengelola risiko-risiko ini secara proaktif.

4.3. Pemetaan Program Eksisting ke dalam Tiga Pilar SRM

Analisis terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Laporan Capaian (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2023) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang sesungguhnya telah menjalankan berbagai program yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pilar Manajemen Risiko Sosial.

Akan tetapi, program-program ini cenderung berjalan secara parsial di masing-masing Perangkat Daerah (OPD) dan belum terintegrasi dalam satu kerangka komando manajemen risiko. Pemetaan program-program kunci ke dalam kerangka SRM disajikan pada Tabel 2.

Table 2. Pemetaan Program Kunci ke SRM

Pilar SRM	Tujuan	Program Eksisting di Kabupaten Sumedang	Perangkat Daerah Terkait
Pencegahan (Prevention)	Mengurangi probabilitas risiko terjadi. (Investasi Modal Manusia)	a. Program Universal Health Coverage (UHC) b. Program Penurunan Stunting c. Beasiswa/Bantuan Pendidikan (BOS, PIP) d. Pelatihan Vokasi & Wirausaha Baru (WUB)	Dinkes, Bappeda, Disdik, Disnaker
Mitigasi (Mitigation)	Mengurangi dampak jika risiko terjadi. (Mekanisme Pembagian Risiko)	e. Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan (sektor informal) f. Program Asuransi Usaha Tani (AUT) g. Penguatan Koperasi & UED-SP (Simpan Pinjam) h. Program Padat Karya (Infrastruktur)	Disnaker, Distan, Diskoperasi UKMPP, DPMD
Penanganan (Coping)	Memberi dukungan setelah risiko terjadi. (Jaring Pengaman Sosial)	i. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa j. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Sembako) k. Program Keluarga Harapan (PKH) l. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) m. Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	Dinsos, DPMD, Disperkimtan, Dinkes

Sumber: Analisis Peneliti (2024), diolah dari RPD Sumedang 2024-2026 dan Laporan Capaian 2023.

4.4. Kesenjangan Kebijakan dan Peluang Integrasi SRM

Pemetaan pada Tabel 2 mengungkap temuan krusial sekaligus menjadi inti dari penelitian ini.

1. Pertama, terlihat adanya ketimpangan fokus kebijakan (policy imbalance). Bobot intervensi saat ini sangat terkonsentrasi pada pilar Penanganan (Coping). Ini sejalan dengan temuan di Pendahuluan bahwa pendekatan yang dominan adalah reaktif. Intervensi seperti BLT, PKH, dan Rutilahu difokuskan untuk "mengobati" kemiskinan yang sudah teridentifikasi (tepat sasaran berkat data P3KE). Namun, strategi ini memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi dan tidak secara langsung membangun ketahanan rumah tangga untuk keluar dari kerentanan.
2. Kedua, program di pilar Pencegahan dan Mitigasi (seperti program kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja) sudah berjalan, namun belum terintegrasi secara eksplisit sebagai strategi manajemen risiko kemiskinan. Program-program ini masih dipandang sebagai program sektoral OPD, bukan sebagai instrumen proaktif untuk mencegah rumah tangga rentan (yang berada tipis di atas garis kemiskinan) agar tidak jatuh miskin akibat guncangan (sakit, PHK, atau bencana).
3. Ketiga, inilah kesenjangan kebijakan (policy gap) utama: belum adanya kerangka kerja yang mengorkestrasi ketiga pilar ini secara sistematis. Akibatnya, terjadi fragmentasi program. Padahal, tantangan 'Paradoks Cimanggung' (risiko PHK/sakit) dan risiko bencana (kovariat) menuntut intervensi kuat di pilar Pencegahan dan Mitigasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi SRM (Holzmann & Jorgensen, 2001) ke dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menjembatani kesenjangan ini. SRM menyediakan "bahasa" dan kerangka kerja untuk mengubah program-program sektoral (Pencegahan & Mitigasi) menjadi strategi penanggulangan kemiskinan yang proaktif. Hal ini sejalan dengan mandat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2023), yang menuntut pemerintah daerah untuk mengadopsi tata kelola risiko dalam pembangunan, termasuk pembangunan sosial.

Temuan di Sumedang, di mana program penanggulangan kemiskinan cenderung reaktif dan belum terintegrasi secara penuh dalam kerangka risiko yang sistematis, sesungguhnya mencerminkan tantangan yang lebih luas di tingkat nasional. Penelitian akademis terkini, seperti studi oleh Gasior et al. (2023), juga menyoroti bahwa meskipun sistem perlindungan sosial di Indonesia efektif dalam situasi normal, sistem tersebut belum cukup kuat untuk mempersiapkan rumah tangga rentan dalam menghadapi guncangan (shocks) besar seperti bencana atau krisis ekonomi.

4.5. Alternatif Pilihan Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan beberapa alternatif kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Menginstitutionalkan SRM ke dalam Perencanaan Daerah: Pemerintah Kabupaten Sumedang direkomendasikan untuk secara formal mengintegrasikan kerangka tiga pilar Manajemen Risiko Sosial (Pencegahan, Mitigasi, Penanganan) ke dalam dokumen perencanaan strategis berikutnya, khususnya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (RAD PK) periode 2025-2029.
2. Penguatan Tata Kelola Risiko Sosial: Membentuk atau memperkuat unit/fungsi khusus di bawah Bappeda sebagai koordinator dan pemantau risiko sosial daerah. Unit ini bertugas mengorkestrasi program lintas-OPD (Dinsos, Dinkes, Disnaker, BPBD, dll.) agar berjalan sinergis dalam kerangka SRM, tidak lagi parsial.
3. Optimalisasi Kolaborasi Pentahelix Berbasis Data: Melanjutkan dan memperkuat kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media) tidak hanya untuk intervensi coping (seperti donasi), tetapi juga untuk program prevention (pelatihan kerja oleh industri) dan mitigation (asuransi mikro), dengan tetap berbasis pada data P3KE sebagai data sasaran utama.

5. CONCLUSION

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang melalui lensa kerangka Manajemen Risiko Sosial (SRM). Kesimpulan utama menunjukkan bahwa keberhasilan signifikan Sumedang dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 3,11% (2022) menjadi 0,53% (2023) utamanya didorong oleh perbaikan tata kelola data (P3KE) dan penguatan intervensi pada pilar penanganan (coping) atau respons reaktif.

Meskipun efektif untuk penanganan jangka pendek, pendekatan ini menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan (policy gap) dan ketimpangan fokus (policy imbalance). Program-program yang bersifat proaktif pada pilar pencegahan (prevention) dan mitigasi (mitigation) telah ada, namun masih berjalan sektoral dan

belum terintegrasi sebagai strategi manajemen risiko kemiskinan yang kohesif. Tantangan struktural lokal, seperti paradoks kemiskinan di kawasan industri (Cimanggung) dan risiko bencana kovariat, menuntut adanya transisi paradigma.

Studi ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan penanggulangan kemiskinan dan membangun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, Kabupaten Sumedang perlu beralih dari pendekatan yang dominan reaktif menuju kerangka kebijakan yang proaktif dan terintegrasi berbasis Manajemen Risiko Sosial (SRM).

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Studi kasus di Sumedang ini memiliki implikasi penting bagi daerah lain di Indonesia. Keberhasilan Sumedang dalam penanggulangan kemiskinan perlu semakin dioptimalkan. Fondasi yang paling utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah menginstitutionalkan SRM ke dalam Perencanaan Daerah. Diantara best practice yang dilakukan Sumedang sebagai fondasi penanggulangan kemiskinan adalah akurasi data. Daerah lain dapat mereplikasi model Sumedang dalam pemanfaatan data, tetapi harus melangkah lebih jauh dengan mengadopsi kerangka SRM untuk memastikan bahwa program tidak hanya "mengobati" tetapi juga "mencegah" kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Adi, I. R. (2020). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Berita Resmi Statistik, No. 53/07/Th. XXVI.
- BPS Kabupaten Sumedang. (2024). *Kabupaten Sumedang dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sumedang.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). Routledge.
- Effendi, J. (2025). *Strategi Model Pengembangan Microbanking Syariah yang Inklusif, Adaptif, dan Berkelanjutan bagi UMK di Indonesia [Orasi Ilmiah Guru Besar]*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Gasior, K., Wright, G., Barnes, H., & Noble, M. (2023). *Adaptive social protection in Indonesia – Stress-testing the effect of a natural disaster on poverty and vulnerability* (CeMPA Working Paper Series, No.CEMPA1/23). University of Essex.
- Haryaningsih, S., Seran, S. T., & Sihaloho, N. T. P. (2024). *Crisis-Responsive Social Protection: Counterfactual Evidence on Poverty Reduction from Indonesia's Response to Covid-19*. *Natapraja*, 12(1), 58–74. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v12i1.88630>
- Holzmann, R., & Jorgensen, S. (2001). *Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection and Beyond*. *International Tax and Public Finance*, 8(4), 529–556. <https://doi.org/10.1023/A:1011247824083>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage publications.
- Nurasiah, & Khasanah, U. (2025). *Vocational Training: Perannya Dalam Memutus Rantai Kemiskinan*. *Jurnal Ilmiah PESHUM (Pemberdayaan Sosial, Ekonomi Dan Humaniora)*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.37339/peshum.v4i2.9630>
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026*. Bappeda Kabupaten Sumedang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional*.
- Sari, R. N., & Nugroho, A. (2025). *Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Harapan Lama Sekolah terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu*. *IDENTIK: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 02(03), 91–98.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). *Measuring and Analyzing Poverty in Indonesia*. SMERU Research Institute.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. General Assembly. A/RES/70/1.
- World Bank. (2013). *The World Development Report 2014: Risk and Opportunity Managing Risk for Development*. The World Bank.